

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS
KELALAIAN KORPORASI DALAM KESELAMATAN
KERJA BIDANG KONSTRUKSI**

SKRIPSI



Oleh :

MAXELLINO M.M.H
NPM : 22300083

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS
KELALAIAN KORPORASI DALAM KESELAMATAN
KERJA BIDANG KONSTRUKSI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

MAXELLINO M.M.H

22300083

SURABAYA , 12 DESEMBER 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. EDI KRISHARJANTO, S.H., M.H., CPM., Adv

PEMBIMBING

HANUNG WIDJANGKORO S.H., M.H




**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS
KELALAIAN KORPORASI DALAM KESELAMATAN
KERJA BIDANG KONSTRUKSI**

DI PERSIAPKAN DAN DI SUSUN

OLEH:
MAXELLINO M.M.H
22300083

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA
TANGGAL 23 DESEMBER 2025 DAN DINYATAKAN TELAH
MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum. (KETUA) 1 
2. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2 
3. HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H. (ANGGOTA) 3 

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN KORPORASI DALAM KESELAMATAN KERJA BIDANG KONSTRUKSI".

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat doa, dorongan, bimbingan, dukungan, motivasi dan semangat dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Edi Krishariyanto S.H., M.H., CPM., Adv. Selaku Dekan yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
3. Hanung Widjankoro S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama pengerjaan skripsi
4. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD., selaku kepala program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
5. Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.kn. CMC Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan, serta staf tata usaha
7. Kedua orang tua yang tercinta, Bapak Hotman Habajahan dan Ibu Krismastina Tamba, serta keluarga dan saudara yang senantiasa memberi dukungan moral, materill, semangat, nasehat serta doa demi kelancaran penulis dalam mengerjakan

skripsi

8. Sahabat-Sahabat penulis yang selama berada di bangku perkuliahan yang mengibur dan memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi penulis.
9. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran maupun dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan kalian semua akan terbalaskan oleh Allah.

Surabaya, 12 Desember 2025

Penulis



Maxellino Manumpak Maleakhi Habajahan

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : Maxellino Manumpak Maleakhi Habajahan

NPM : 22300083

Alamat : Jl. Waringin Gg Mlaten No.19

Email : maxellpasaribu@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN KORPORASI DALAM KESELAMATAN KERJA DI BIDANG KONTRUKSI**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 12 Desember 2025
Yang menyatakan



Maxellino Manumpak Maleakhi Habajahan
NPM: 22300083

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana atas kelalaian korporasi dalam keselamatan kerja di bidang konstruksi dilatarbelakangi dari meningkatnya angka kecelakaan kerja di Indonesia, yang menunjukkan bahwa penerapan K3 pada korporasi masih belum optimal, khususnya pada sektor konstruksi dan industri berisiko tinggi. Kasus kecelakaan kerja seperti ledakan tanur PT ITSS menunjukkan adanya dugaan kuat kelalaian prosedural, lemahnya pengawasan, serta kegagalan sistem manajemen keselamatan perusahaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana penerapan sistem keselamatan kerja pada korporasi ditinjau dari peraturan perundang-undangan Indonesia, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian korporasi dalam penerapan keselamatan kerja berdasarkan hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, berdasarkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem keselamatan kerja pada banyak korporasi masih bersifat formalitas dan belum membentuk budaya keselamatan (*safety culture*) yang kuat. Pada kasus PT ITSS, ditemukan indikasi penyimpangan SOP K3, kegagalan melakukan tindakan pencegahan seperti emergency shutdown, lemahnya pengawasan teknis terhadap peralatan berbahaya, serta pelaksanaan SMK3 yang tidak efektif. Dari perspektif hukum pidana, bentuk pertanggungjawaban korporasi dapat dikenakan melalui beberapa doktrin, antara lain teori identifikasi, pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), dan pertanggungjawaban berdasarkan budaya korporasi. Ketiganya menunjukkan bahwa kesalahan tidak hanya berada pada pekerja lapangan, melainkan pada struktur manajemen dan kebijakan perusahaan yang mengabaikan kewajiban perlindungan keselamatan kerja. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai menyediakan standar keselamatan, melakukan pengawasan, atau mengendalikan risiko kerja sesuai ketentuan hukum. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan penegakan hukum, serta pembinaan berkelanjutan untuk memastikan korporasi menjalankan kewajiban K3 secara menyeluruh.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kelalaian Korporasi, Keselamatan Kerja,

ABSTRACT

Criminal liability for corporate negligence in occupational safety in the construction sector is motivated by the increasing number of work accidents in Indonesia, which indicates that the implementation of K3 in corporations is still not optimal, especially in the construction sector and high-risk industries. Work accident cases such as the PT ITSS furnace explosion indicate a strong suspicion of procedural negligence, weak supervision, and failure of the company's safety management system. The problem formulation in this study includes how the implementation of occupational safety systems in corporations is reviewed from the perspective of Indonesian laws and regulations, and what form of criminal liability there is for corporate negligence in implementing occupational safety based on Indonesian criminal law.

This study uses a normative legal research method, with a statutory approach, a conceptual approach based on primary, secondary, and tertiary legal sources..

The research discussion shows that the implementation of occupational safety systems in many corporations is still a formality and has not yet formed a strong safety culture. In the case of PT ITSS, indications were found of deviations from the Occupational Health and Safety Standards (SOP K3), failure to take preventative measures such as emergency shutdowns, weak technical supervision of hazardous equipment, and ineffective implementation of the Occupational Health and Safety Management System (SMK3). From a criminal law perspective, corporate liability can be imposed through several doctrines, including identification theory, vicarious liability, and corporate culture-based liability. All three indicate that the fault lies not only with field workers, but also with the management structure and company policies that ignore the obligation to protect occupational safety. The research conclusion confirms that corporations can be held criminally liable if proven negligent in providing safety standards, supervising, or controlling work risks in accordance with regulations. rather, it's the company's management structure and policies that neglect occupational safety obligations. The study's conclusions confirm that corporations can be held criminally liable if proven negligent in providing safety standards, supervising, or controlling occupational risks in accordance with legal provisions. Furthermore, regulatory strengthening, increased law enforcement, and ongoing development are needed to ensure corporations fully comply with their OHS obligations.

Keywords: *Criminal Liability, Corporate Negligence, Occupational Safety*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kerangka Konseptual	6
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis	12
BAB II PENERAPAN SISTEM KESELAMATAN KERJA PADA KORPORASI	17
2.1 Pengaturan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja pada korporasi	17
2.2 Penerapan sistem keselamatan kerja pada sebuah korporasi	27
2.3 Dampak bagi korporasi yang melalaikan keselamatan kerja	38
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIN KORPORASI DALAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIBIDANG KONTRUKSI	43

3.1 Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kelalaian penerapan keselamatan kerja	43
3.2 Penerapan sanksi pidana korporasi terhadap kelalaian penerapan keselamatan kerja yang mengakibatkan kematian tenaga kerja dibidang kontruksi	54
BAB IV PENUTUP	62
4.2 Kesimpulan	62
4.2 Saran.....	63
DAFTAR BACAAN	